

	News Title : Bappebti Targetkan CPO Indonesia Jadi Patokan Harga Dunia	
	Media Name : beritasatu.com	Journalist : Zsazya Seniorita
	Publish Date : 19 October 2022	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 3,000,000
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti))	Ads Value : 1,000,000
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : sawit

Bappebti Targetkan CPO Indonesia Jadi Patokan Harga Dunia

Rabu, 19 Oktober 2022 | 22:09 WIB
Oleh : Zsazya Seniorita / FER



Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko. (Foto: Beritasatu Photo/Zsazya Seniorita)

Jakarta, Beritasatu.com - Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) menargetkan harga minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO) Indonesia dapat menjadi patokan harga di dunia.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan, patokan harga CPO ini diharapkan dapat tercapai dalam waktu satu tahun.

"Kami akan mencoba tidak hanya timah yang jadi harga acuan tetapi juga komoditas lain, dalam waktu dekat kami akan coba dengan CPO. Tetapi ini masih dalam kajian, kami akan bicara lagi bagaimana mekanisme eksponya," jelas Didid di acara Indonesia Tin Conference 2022 di Jakarta, Rabu (19/10/2022).

Didid menyebutkan, saat ini timah adalah satu-satunya komoditas yang bisa masukan di bursa berjangka dan menghasilkan referensi harga untuk komoditas timah dunia.

Indonesia telah menerapkan peraturan terkait ekspor timah murni batangan melalui bursa berjangka. Tujuan akhirnya, menciptakan transparansi harga demi mewujudkan kemandirian dalam menentukan harga acuan.

"Kami akan mencoba dengan komoditas lainnya. Karena Indonesia penghasil utama komoditas tetapi contohnya kemarin dengan minyak goreng dan CPO kita mengacu pada Malaysia dan Rotterdam. Setidaknya berikutnya kami ikuti hal sama (seperti timah), kemudian bisa komoditas lainnya kopi dan karet. Ini akan jadi target selanjutnya untuk memastikan bursa berjangka Indonesia mampu menjadikan *price reference* bagi komoditas-komoditas Indonesia," papar Didid.

Sebagai tahap awal, Bappebti akan membuka diskusi dengan kementerian atau lembaga terkait tentang bagaimana tata kelola ekspor CPO yang terbaik. Diskusi juga akan dilakukan bersama Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, BUMN, hingga pelaku bisnis, terkait kesiapan mereka.

Hal itu dilakukan untuk membahas insentif yang bisa diberikan karena umumnya tidak banyak yang ingin masuk ke bursa berjangka. Bappebti perlu mengonfirmasi bagaimana kesanggupan keuangan negaranya.

"Intinya, kalau itu sudah masuk bursa, kami nanti ada transparansi harganya. Jadi sebetulnya harga ekspor CPO itu berapa sih. Kalau sekarang kita ada ekspor mengacu pada Rotterdam kita bobot sekian persen, Malaysia sekian persen dan dalam negeri sekian persen," jelas dia.

Bappebti akan menyusun peta jalan (*roadmap*) dalam waktu dekat. Pasalnya, Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 telah mengamanahkan Bappebti untuk membangun bursa yang mampu mewujudkan harga acuan, sedangkan saat ini baru timah yang sudah tercapai. *Roadmap* dimaksud akan mencontoh *roadmap* timah dalam menjadi patokan harga dunia.

"Jadi *roadmap* timah tentu akan kami jadikan acuan tetapi tidak akan persis seperti timah. Kalau memang dipandang perlu ekspor melalui bursa kenapa tidak," sambung Didid.

Ketika harga dan perdagangan CPO sudah transparan, dia meyakini kebijakan lain bisa diambil dari data yang terangkum di bursa berjangka, seperti kebijakan domestic market obligation (DMO) maupun domestic price obligation (DPO).